

BAB I

PENDAHULUAN

Hal-hal yang akan dikemukakan dalam Bab I pada penelitian ini adalah: (a) Latar belakang masalah; (b) Fokus penelitian; (c) Tujuan penelitian; (d) Manfaat penelitian; (e) Definisi operasional; (f) Penelitian terdahulu; (g) Kerangka pemikiran; dan (h) Sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Setiap lembaga pendidikan adalah organisasi jasa kemanusiaan yang memerlukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup organisasi. Bagaimanapun, setiap aspek dan bidang diarahkan untuk mencapai efektifitas manajemen lembaga pendidikan, baik bidang personalia, perlengkapan, material maupun para ahli bidang khusus. Semuanya dimanfaatkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran dalam pendidikan. Demikian halnya sistem pembuatan anggaran lebih merupakan mekanisme memperlancar kerja daripada tugas teknis atau mekanik yang seharusnya membantu pimpinan lembaga pendidikan untuk membuat rencana, koordinasi, pengawasan dan evaluasi tindakan organisasi secara lebih efektif.

Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana suatu institusi berkaitan dengan hidup dan matinya sebuah lembaga, apapun jenisnya dan bidang aktivitasnya. Manajemen keuangan diartikan sebagai suatu usaha pengelolaan sumber keuangan, pemanfaatan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan oleh manajer dalam suatu lembaga pendidikan. Secara umum sumber pembiayaan lembaga pendidikan dapat berasal dari: (1) orang tua murid dan masyarakat

(perorangan dan dunia usaha), (2)Pemerintah, baik berupa dana rutin (institusi negeri) maupun bantuan (bagi institusi swasta).¹ Sebagaimana pendapat McMahan, bahwa sumber dana sekolah dapat diklasifikasikan menjadi tiga sumber utama yakni dari pemerintah, masyarakat dan orang tua.²

Keberadaan sekolah swasta mulai terpinggirkan. Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah semakin menunjukkan terjadinya diskriminasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Adanya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menarik guru-guru pegawai negeri sipil yang mengajar disekolah swasta, misalnya, menjadi contoh nyata memperlemah sekolah swasta. Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga melarang dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikucurkan untuk sekolah swasta. Sekolah swasta dan negeri sebenarnya memiliki kesamaan misi, yakni mencerdaskan anak-anak bangsa. Pemerintah perlu melihat sejarah kelahiran yayasan pendidikan. Di daerah lain pun sekolah swasta lebih dahulu didirikan, jauh sebelum Indonesia Merdeka. Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan sebenarnya sama, tidak membedakan sekolah negeri atau sekolah swasta.

Sejumlah pemerintah daerah enggan mengucurkan dana dari APBD untuk sekolah swasta atau sekolah yang didirikan atas prakarsa masyarakat. Karena itu Kementerian Pendidikan Nasional akan segera membicarakan persoalan ini dengan menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan bahwa bahwa tidak salah

1. Syafaruddin, *Manajemen Lembaga pendidikan Islam*, (Jakarta: PT.Ciputat Press, 2005) Cet. Ke1, hlm.267

² McMahan, W.W, *Improving Education Finance in Indonesia*, New York: Policy Research Center, Institute for Research and Development, Unesco, 2001, hal.60.

mengucurkan dana APBD untuk sekolah swasta.³ Dilihat dari segi penggunaan, sumber dana dapat dibagi menjadi: (a) Anggaran untuk kegiatan rutin (gaji dan operasional sehari-hari), (b) Anggaran untuk pengembangan sekolah (Depdiknas, 1999). Besarnya biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah ditingkat pusat dan daerah setelah mempertimbangkan skala prioritas. Besarnya penerimaan dari masyarakat baik dari perorangan maupun lembaga, yayasan, berupa uang tunai, barang, hadiah atau pinjaman bergantung pada kemampuan masyarakat setempat dalam memajukan pendidikan. Besarnya dana yang diterima dari orang tua siswa berupa sumbangan pembangunan pendidikan (SPP), atau dana pembangunan pendidikan (DPP), atau dana yang langsung diterima sekolah didasarkan atas kemampuan orang tua murid atau ditentukan oleh pemerintah atau yayasan (bagi swasta). Sedangkan dana dari bantuan lain termasuk bantuan dari pinjaman luar negeri yang diperuntukan bagi pendidikan, seperti bantuan UNICEF atau UNESCO, pinjaman Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, atau Bank Pembangunan Islam. Sebagaimana pendapat Freeman dan Shoulders bahwa sekolah dapat menggunakan metode alternatif menggali sumber dana. Sekolah dapat mengupayakan alternative sumber dana lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan perundang-undangan.⁴

Pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah pusat berupa anggaran rutin, anggaran proyek yang setiap tahun disalurkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sesuai kebutuhan sekolah negeri. Anggaran rutin dibiayai dari penerimaan

³ Eln/abk/Ara, *Sekolah Swasta Terpinggirkan*, Kompas, (Jakarta : 2 Mei 2011) hlm.1

⁴ Freeman, R.J., dan Shoulders, C.D. *Governmental and Nonprofit Accounting*. New Jersey: Printice Hall International, Inc, 1999 .hal.75

pajak, sedangkan anggaran proyek dibiayai dari surplus anggaran rutin dan bantuan luar negeri/pinjaman luar negeri. Disamping pemerintah daerah propinsi, dan kabuupaten/kota juga bertanggung jawab membiayai sekolah-sekolah, madrasah dan pesantren dengan memberikan bantuan atau subsidi pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa : “ Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan mimimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.⁵

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis keuangan sekolah dan hasil (*output*) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisis biaya satuan (*unit cost*) per siswa. Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah (*enrollment*) dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan persiswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.⁶

Rencana pembiayaan adalah berkaitan dengan penjabaran pembiayaan dari program kerja tahunan sekolah atau madrasah. Pembiayaan yang direncanakan baik penerimaan maupun penggunaannya selama satu tahun itulah yang dituangkan dalam

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta Penjelasannya, Bandung: Fokus Media, 2006.

⁶ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Bandung:Pt.Imperial BhaktiUtama,2007) Cet.Ke-2, hlm.290

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM).

Dalam Depdiknas (1999) dijelaskan ada beberapa langkah dalam penyusunan RAPBS, yaitu: (1) Menginventaris program/kegiatan sekolah selama satu tahun mendatang; (2) Menyusun program/kegiatan tersebut berdasarkan jenis kerja dan prioritas; (3) Menghitung volume, harga satuan dan kebutuhan dana untuk setiap komponen kegiatan; (4) Membuat kertas kerja dan lembaran kerja; menentukan sumber dana dan pembebanan anggaran serta menuangkannya ke dalam format baku RAPBS/RAPBM; dan (5) Menghimpun data pendukung yang akurat untuk bahan acuan guna mempertahankan anggaran yang diajukan.

Dalam upaya memantapkan manajemen keuangan dan sumber daya material, harus menekankan nilai-nilai kemanfaatan, yang dijelaskan Law dan Glower (2000 :210), yaitu: (1) Memperoleh barang-barang dengan biaya yang rendah, (2) Mencapai hasil sesuai sumber daya dan biaya yang dipergunakan (efektifitas), (3) Keterjaminan hasil dalam biaya yang minimum (efisiensi), (4) Ada jaminan pendistribusian sumber daya material untuk mendukung proses pembelajaran (pemerataan).

Anggaran biaya sekolah terdiri dari dua hal yang satu sama lain saling berkaitan. Pertama anggaran penerimaan/pendapatan, dan kedua anggaran pengeluaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan sekolah. Anggaran penerimaan sekolah adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur atau tidak. Sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang

dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan masyarakat secara langsung merupakan sesuatu yang logis sebab masyarakat adalah klien dari output system pendidikan dan pelatihan tersebut. Dengan demikian dana yang ada pada pemerintah dapat digunakan untuk hal-hal yang luar biasa, misalnya dalam membentuk beasiswa nasional untuk kebutuhan tenaga-tenaga langka atau untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang pandai, tetapi ekonomi lemah. Demikian pula biaya yang dimiliki pemerintah dapat digunakan untuk program-program pendidikan yang “*nonmarket*”.⁷ Sebagaimana pendapat Thomas (Anwar, 2004) bahwa biaya langsung (nondiskresioner) untuk pembelajaran akan berpengaruh terhadap output pendidikan yaitu berupa nilai pengorbanan untuk penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, akan dirasakan manfaatnya oleh siswa.⁸

Belanja sekolah sangatlah ditentukan oleh besarnya anggaran pendapatan atau penerimaan sekolah yang diterima dari berbagai sumber, langsung atau tidak langsung. Pengeluaran sekolah tersebut dapat dikategorikan kepada beberapa hal, yaitu : (1) Pengeluaran untuk pelaksanaan pembelajaran; (2) Pengeluaran untuk tata usaha sekolah (3) Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana (fasilitas) sekolah; (4) Pengeluaran untuk kesejahteraan pegawai; (5) Pengeluaran untuk administrasi ; (6) Untuk pembinaan teknis pendidikan; (7) Untuk pendataan .

⁷ H.A.R.Tilaar, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*, (Jakarta:PT.Gramedia Widiasarana Indonesia,1997) Cet.Ke-1, hlm. 242

⁸Anwar, M.I. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta) , 2004.hal.158

Bagi lembaga pendidikan proses pengawasan dilakukan secara langsung oleh para pimpinan terhadap bidang yang menggunakan keuangan. Tetapi secara struktural dan fungsional ada proses pengawasan yang bekerja untuk mengaudit penggunaan biaya yang dikeluarkan. Sekolah-sekolah agama atau pesantren sudah saatnya memperhatikan pengawasan anggaran ini, karena berkaitan dengan amanah yang menuntut akuntabilitas (vertikal dan horizontal) pimpinan terhadap masyarakat dan pihak lain yang mempercayakan uangnya untuk dimanfaatkan bagi pengembangan pendidikan Islam.

Rendahnya anggaran pendidikan merupakan kendala yang besar. Keadaan ini diperburuk oleh sistem pengelolaan anggaran yang terpusat. Pengelolaan anggaran secara terpusat telah mengakibatkan penggunaan sumber daya sangat tidak efisien. Karena rendahnya kepercayaan terhadap sekolah selama ini, pemerintah pusat seringkali mengasumsikan berbagai alat, bahan, dan input pendidikan lainnya yang dibutuhkan sekolah, harus diadakan oleh pusat lalu dikirimkan ke sekolah. Cara lain yang lebih maju adalah memberikan anggaran kepada sekolah yang sebagian besar atau seluruhnya sudah diperuntukkan (*earmarked*) untuk pembelanjaan alat, bahan, atau input pendidikan tertentu sesuai dengan asumsi pusat.⁹

Pemanfaatan anggaran tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena itu diperlukan pengawasan anggaran sebagai upaya memperkuat akuntabilitas para pimpinan sekolah. Pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan demikian, pengawasan anggaran

⁹ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: Paramadina/PT.Logos Wacana Ilmu, 2003) Cet. Ke-2, hlm. 32

diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan sumber dana yang tersedia. Jadi secara umum proses pengawasan tersebut mencakup kegiatan memantau, menilai, dan melaporkan hasil pengawasan kepada pemerintah, atau yayasan (swasta/masyarakat).

Madrasah Tsanawiyah Swasta adalah salah satu lembaga pendidikan di bawah lingkungan Kementerian Agama yang merupakan lembaga penyelenggara pendidikan lanjutan tingkat atas yang memadukan kurikulum sehingga dalam penyelenggaraannya secara umum sama dengan sekolah umum dan secara khusus sebagai ciri khas Islamnya pelajaran Agama Islam melakat dalam satu kesatuan kurikulum madrasah.

Di Kabupaten Pulang Pisau ada 2 buah Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 8 buah Madrasah Tsanawiyah Swasta yaitu MTsN Kahayan Hilir di Pulang Pisau, MTsN Maliku di Maliku, MTs Annor Handep Hapakat di Pulang Pisau, MTs Hidayatullah dan MTs Sullamul Mubtadi serta MTs Ta'limul Muta'allim di Kahayan Kuala, MTs Mujahidin di Sebagau, MTs Nurul Hidayah di Mintin, MTs Nurul Ulum di Tahai dan MTs Al-Khairiyah di Pandih Batu. Diantara delapan buah Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut terdapat 3 buah Madrasah yang termasuk mengalami kemajuan setiap tahun yaitu MTs Annor Handep Hapakat di Pulang Pisau, MTs Hidayatullah dan MTs Ta'limul Muta'allim di Kahayan Kuala. Memang ketiga madrasah tersebut mengalami kemajuan dari pada madrasah-madrasah tsanawiyah swasta lainnya, baik segi bangunan, manajemen tata usaha termasuk pengelolaan

keuangan madrasah.¹⁰ Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Strategi dan kebijakan Kepala Madrasah dalam menggali sumber dan penggunaan dana pendidikan (Studi multisitus pada 3 Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Pulang Pisau).

B. Fokus Penelitian

Bertolak dari latar belakang kondisi Madrasah Tsanawiyah swasta yang ada di Kabupaten Pulang Pisau seperti tersebut di atas maka penelitian ini fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi kepala madrasah dalam menggali sumber keuangan pada Madrasah Tsanawiyah swasta di Kabupaten Pulang Pisau ?
2. Bagaimana kebijakan kepala madrasah dalam penggunaan dana pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Pulang Pisau ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan strategi Kepala Madrasah dalam menggali sumber dana keuangan pada Madrasah Tsanawiyah swasta di Kabupaten Pulang Pisau .
2. Untuk mengetahui kebijakan Kepala Madrasah dalam penggunaan dana pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah swasta di Kabupaten Pulang Pisau .

¹⁰ Wawancara dengan Langgeng Murdopo, SE, Mapenda Islam Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 24 Juni 2011.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini ,diharapkan memberikan sejumlah manfaat, antara lain :

- 1) Secara teoritis/akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Memperkaya khasanah kepustakaan kependidikan, khususnya mengenai proses manajemen keuangan Madrasah.
 - b. Memperluas wawasan keuangan di madrasah khususnya bagi kepala madrasah dan pengawas pendidikan Islam
 - c. Memperluas wawasan manajemen keuangan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk:
 - a. Manfaat bagi Kementerian Agama adalah untuk mengawasi dana pendidikan yang ada di satuan kerja atau sekolah yang menjadi binaannya.
 - b. Manfaat bagi para pengawas adalah untuk memberikan kontrol yang baik bagi kepala madrasah dalam mengelola dana pendidikan disekolahnya.
 - c. Manfaat bagi Kepala Madrasah dapat memberikan masukan bagi Kepala Madrasah untuk mengetahui langkah yang tepat dalam mengelola keuangan sehingga mampu untuk memajukan madrasahnyanya.
 - d. Manfaat bagi guru dan tenaga kependidikan adalah mengetahui dan melaksanakan dana yang ada sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat sebelumnya.
 - e. Manfaat bagi peneliti lain adalah sebagai bahan masukan untuk penelitian manajemen keuangan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul tesis ini maka akan dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Yang dimaksud strategi dalam penelitian ini adalah bagaimana rencana kepala madrasah dalam menggali sumber-sumber keuangan dan kebijakan penggunaan dana tersebut untuk kegiatan pada madrasahnyanya.
2. Kebijakan adalah keputusan untuk melaksanakan sesuatu kegiatan.
3. Sumber dana adalah asal-usul dana diperoleh.
4. Penggunaan dana adalah pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini difokuskan pada Manajemen Sumber Daya Keuangan dan Dana Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Pulang Pisau. Sementara ini belum ditemukan penelitian yang sama sebagaimana penulis teliti, namun ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan apa yang penulis teliti, seperti :

1. Penelitian Ilham tentang: Manajemen Anggaran Biaya Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Tahun 2009. Kesimpulan tesis Ilham menunjukkan bahwa pelaksanaan Manajemen Anggaran Biaya Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Tahun 2009 adalah penyusunan anggaran biaya pendidikan berorientasi pada sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

Kapuas sesuai dengan misi dan misi dan menempatkan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya serta memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.¹¹

2. Penelitian Imam Gunawan tentang: Hubungan Ketersediaan, Alokasi Penggunaan, dan Ketaatan Peraturan Penggunaan Dana dengan Mutu Pendidikan SMA Negeri Se-Kota Malang. Kesimpulan Tesis Imam Gunawan adalah terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan, alokasi penggunaan, dan ketaatan peraturan penggunaan dana dengan mutu dana pendidikan dalam rangka peningkatan SMA Negeri Se-Kota Malang. Hal ini berarti peningkatan ketersediaan, alokasi penggunaan, dan ketaatan peraturan penggunaan dana akan mengakibatkan peningkatan mutu pendidikan SMA Negeri Se-Kota Malang.¹²

G. Kerangka Pemikiran

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam

¹¹ Tesis Ilham, Tidak dipublikasikan, (Banjarmasin :Pasca Sarjana Unlam, 2010)

¹² Tesis Imam Gunawan, Tidak dipublikasikan (Banjarmasin: Pasca Sarjana Unlam, 2010)

kajian manajemen pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.¹³

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Duke dan Canady (1991) bahwa peraturan dibuat agar program dilaksanakan dengan konsisten, teratur, dan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas sekolah.¹⁴

Sebuah organisasi tentunya membutuhkan pengelola keuangan untuk memastikan tertopangnya kegiatan operasional dari aspek pendanaan. Tidak terkecuali sekolah. Diperlukan dana yang cukup untuk menjalankan sejumlah program kegiatan dalam periode tertentu. Seperti halnya organisasi-organisasi umum lainnya, dana yang dimiliki sekolah harus diatur dan dicatat sedemikian rupa agar jelas arus masuk dan keluarnya, termasuk ketepatan penggunaannya. Pengaturan uang atau dana yang dimiliki oleh sekolah pada umumnya dilakukan oleh seorang bendahara. Tugas bendahara sekolah yang secara umum dikenal, yaitu menerima dan mengeluarkan dana-dana yang dimiliki. Ini tugas yang penting. Jika dana yang masuk

¹³ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Peraturan Pemerintah No.19 Th.2005*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007) hlm.129

¹⁴ Duke, D.L., dan Canady, R.L. 1991. *School Policy*. New York: Mc Graw-Hill, Inc

atau keluar tidak ditangani secara khusus oleh orang tertentu, seperti bendahara, perencanaan program sekolah bisa menjadi sulit, dan tentunya hal ini akan memengaruhi pertumbuhan sekolah itu. Seminim-minimnya dana yang dimiliki, jika bisa diatur dan dikelola dengan baik, tentulah dapat menopang pelaksanaan program yang telah direncanakan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi tesis ini, maka sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi tentang latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan telaah Penelitian terdahulu.

Bab II, Tinjauan Pustaka, yang berisi: Pandangan Tentang Manajemen Sumber Keuangan, Strategi Mengelola Keuangan Sekolah, Kebijakan Penggunaan dana pendidikan .

Bab III, Metode Penelitian yang berisi tentang : Jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data serta Tehnik analisa Data.

Bab IV, Laporan Hasil penelitian yang berisi tentang : Lokasi dan Latar Penelitian, Profil Madrasah yang dijadikan objek penelitian, Strategi dan kebijakan Kepala Madrasah dalam menggali sumber dan penggunaan dana pendidikan, serta temuan penelitian pada 3 Madrasah swasta di kabupaten Pulang Pisau.

Bab V, Pembahasan yang berisikan tentang: Strategi Kepala Madrasah dalam menggali sumber keuangan (Multisitus pada 3 Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Pulang Pisau), Kebijakan penggunaan dana pendidikan pada 3 Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Pulang Pisau serta Faktor-faktor yang menghambat dalam pengggalian sumber keuangan dan kebijakan penggunaan dana pendidikan (Multisitus pada 3 Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Pulang Pisau).

Bab VI, Penutup yang merupakan bagian akhir dari tesis yang berisi Simpulan dan saran-saran.